

## Jateng Siapkan Pembelajaran Tatap Muka

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Pemprov Jateng saat ini sedang mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Rencana tersebut sudah dibicarakan bersama bupati/walikota di Jateng, agar masing-masing daerah menyiapkan sekolah yang akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka.

Ganjar Pranowo mengatakan hal tersebut kepada wartawan usai rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di Gedung A Kantor Setda Jateng, Senin (15/3). "Hasil rapat hari ini, Senin (15/3) yang terakhir kita coba siapkan ketentuan-ketentuan untuk belajar tatap muka, ujar Ganjar Pranowo. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus disiapkan secara matang agar nantinya tidak ada kendala. Mulai dari pembatasan kelasnya, sistem transportasi hingga fasilitas yang harus disediakan untuk protokol kesehatan. Semua itu harus dipersiapkan dulu, sehingga jika pada Juli mendatang dibuka belajar tatap muka, setidaknya Jawa Tengah sudah belajar betul selama beberapa bulan ini.

Disinggung soal vaksinasi terhadap guru, Ganjar Pranowo mengatakan guru merupakan pelayan publik yang juga mendapatkan vaksin. Namun, nantinya akan diprioritaskan terhadap guru yang mengajar di sekolah yang memang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. "Minimal gurunya divaksin dulu. Itu menjadi prioritas agar bisa melakukan uji coba tatap muka," tutur Ganjar Pranowo.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, rencana pembelajaran tatap muka sedang disiapkan ketentuan-ketentuannya. Beberapa diantaranya sekolah mana saja, seperti apa protokol kesehatannya dan lain sebagainya. Untuk prioritas vaksin terhadap guru, Yulianto mengatakan untuk saat ini ketentuan dari pusat agar vaksin difokuskan kepada pelayan publik di atas 50 tahun. Sedagkan untuk vaksin guru kalau itu memang menjadi syarat, Jateng akan menyiapkan. (Bdi)

## Peluncuran MPP Kota Magelang Diajukan



KR-Thoha

**Walikota Magelang bersama Direktur Bank Magelang, saat berbicara di forum talkshow.**

**MAGELANG (KR)** - Peluncuran program Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Magelang waktunya diajukan. Sebelumnya akan dilaksanakan Tahun 2022 mendatang, diajukan sekitar Tahun 2021 akhir. Hal itu dikemukakan Walikota Magelang dr H Muchamad Nur Aziz SpPD kepada KR usai berbicara di forum talkshow bertepatan 'Pers, Prokes dan Kebangkitan Ekonomi' yang dilaksanakan PWI Kota Magelang di Museum BPK RI di Magelang dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, Senin (15/3).

"Mudah-mudahan setelah Perubahan (APBD Perubahan) kita ajukan anggarannya, yaitu di Gedung Kiai Sepanjang," kata Walikota Magelang. Setelah berdiskusi dengan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, lanjutnya, muncul gagasan di Gedung Kiai Sepanjang. MPP menjadi sebuah kebutuhan, ada namanya One Stop Service (OSS) juga satu pintu. Kalau tanpa MPP, mustahil hal itu dijalankan. Berkaitan dengan masalah MPP, segala sesuatunya sudah dipersiapkan, termasuk payung hukumnya.

Beberapa hari lalu dilakukan kunjungan ke Kabupaten Pandeglang, dengan didampingi beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Kunjungan ke Kabupaten Pandeglang ini untuk belajar tentang MPP. MPP Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu MPP terbaik di Indonesia. Respons dari masyarakat juga dinilai cukup bagus.

Terkait peran pers dalam kebangkitan informasi di Kota Magelang, Walikota Magelang mengatakan pers di Kota Magelang termasuk menciptakan suasana kondusif dan dinamis. Peran insan pers, selalu memberikan motivasi bagi masyarakat bahwa Kota Magelang semakin hari semakin baik. Juga peran pers dalam penyebaran protokol kesehatan bagi masyarakat, yang dinilai juga cukup baik. (Tha)

## Meresahkan Warga, ODGJ Dievakuasi

**BOYOLALI (KR)** - Tim reaksi cepat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boyolali, melakukan penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali. Penindakan diambil karena laporan warga yang resah atas keberadaan ODGJ tersebut sehingga perlu dievakuasi. Warga merasa terganggu dengan keberadaan pasien ODGJ tersebut karena dinilai sudah merugikan salah satu warga di Dukuh Setro, Desa Karanganyar bermama Sukini yang sudah tidak diurus lagi oleh keluarganya.

Kepala Dinas Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinsos sebenarnya adalah rehabilitasi sosial setelah ke luar dari rumah sakit jiwa. Sedangkan untuk penjemputan sebenarnya merupakan ranah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, namun karena keterbatasan mobilitas dan sumber daya manusia sehingga Dinsos membantu melakukan penjemputan. Setelah dilakukan penjemputan maka akan dilakukan penaksiran apakah orang tersebut akan dikirim ke rumah sakit jiwa atau rumah singgah milik Dinsos Kabupaten Boyolali.

"Setelah dilakukan penjemputan ada dua metode yang dilakukan, bagi ODGJ yang temperamen akan dikirim ke rumah sakit jiwa, tetapi untuk ODGJ yang tidak temperamen akan dikirim ke rumah singgah milik Dinsos," ujar Gojali, Sabtu (13/3). Menurut keterangan yang didapat dari pemegang program jiwa Puskesmas Karanganyar, Sumarni di lokasi, menjelaskan penjemputan dilatarbelakangi oleh keresahan warga setempat. Di samping itu penjemputan ini adalah wujud dari tindak lanjut dari tim relawan khusus program penanganan ODGJ di Boyolali.

Sumarni mengatakan bahwa mulai tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk tim relawan khusus penanganan ODGJ. Anggota tim tersebut adalah relawan perwakilan dari setiap Desa di seluruh Kabupaten Boyolali yang memiliki tugas untuk mendata hingga menangani perawatan penderita ODGJ di wilayah masing-masing. (\*-1)

## KKP Dorong Pengembangan Garam Piramid

**KEBUMEN (KR)** - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan produksi garam piramid di Kampung Garam Kebumen. Saat melakukan kunjungan kerja di Kebumen, Jumat (12/3), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meminta jajarannya menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan kelompok petambak garam.

Kunjungan dilakukan di Kampung Garam Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit, serta tambak udang dan konservasi penyu di Kalibuntu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Kunjungannya disambut Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan anggota Forkopimda,

Sekda serta pimpinan OPD terkait di jajaran Pemkab Kebumen. Trenggono juga mendorong garam yang dihasilkan, dipasarkan secara online karena memudahkan penjual dan pembeli. Harapannya, penyerapan terhadap garam produksi petambak, bisa lebih maksimal. Dengan begitu penghasilan petambak garam ikut meningkat.

Ketua Kelompok Usaha Garam (Kugar) 'Cirat Segoro Renges' Desa Tlogopragoto, Budi Santoso, menyebut penjualan garam melalui online dengan memanfaatkan media sosial, sudah dilakukan. Namun diakui belum maksimal. "Kami sudah jual lewat online tapi masih belum banyak. Kebanyakan

yang beli, datang langsung," terang Budi yang meminta ada pendampingan supaya pengemasan dan promosi yang dilakukan secara online, bisa lebih besar hasilnya.

Selain garam konsumsi, Kugar 'Cirat Segoro Re-

nges' dengan 26 anggota, juga menghasilkan garam kosmetik. Harga jualnya Rp 30.000 sampai Rp 40.000/kg. "Saat ini sedang mengembangkan produksi garam piramid yang harga jualnya mencapai Rp 250.000/kg. Namun dibutuhkan

kan infrastruktur rumah kaca yang belum kami miliki," ujarnya.

Menteri Trenggono mengapresiasi langkah petambak garam di Kebumen yang mau berkembang. "Bisa dibuatkan nanti rumah kacanya. Satu blok dulu untuk model," ujar Menteri Trenggono yang dalam kunjungan kerja di Kebumen didampingi sejumlah Pejabat Eselon I dan II KKP. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), TB Haeru Rahayu, mengatakan akan langsung melakukan konsolidasi internal membahas rencana pembangunan rumah kaca untuk produksi garam piramid. "Kami juga akan koordinasi dengan Pemkab Kebumen," ujarnya. (Suk)



KR-Sukmawan

**Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Kampung Garam Desa Tlogopragoto.**

## Pembayaran Pajak Harus Dipermudah

**SEMARANG (KR)** - Untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), DPRD minta kepada semua Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) berkreasi dan berinovasi dalam upaya memudahkan pembayaran pajak. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto kepada wartawan di Semarang, Senin (15/3).

Menurut Bambang, kepatuhan dalam pembayaran pajak perlu ditingkatkan karena hasil yang diperoleh untuk pembangunan daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan sosialisasi ke masyarakat, baik secara door to door maupun penyediaan mobil samsat keliling.

"Kami selalu mengingatkan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) untuk mengencarkan sosialisasinya. Sosialisasi tidak hanya soal kepatuhan bayar pajak tapi juga menginformasikan mengenai pemutihan atau keringanan pajak," tutur Bambang Kusriyanto. Diakui, masih banyak masyarakat yang ragu mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan tersebut. Kondisi

itu didukung dengan maraknya informasi di media massa dan adanya pejabat yang korupsi pajak.

Adanya pejabat yang melakukan korupsi pajak tersebut membuat masyarakat apatis untuk membayar pajak. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat bahwa pajak tersebut bermanfaat untuk pembangun-

an daerah. Soal pembayaran secara online, ia juga mengatakan bahwa tidak semua masyarakat yang memahami proses pembayaran pajak secara online. Terlebih, tempat tinggal masyarakat yang berada di pelosok dengan jaringan internet yang lemah.

"Jadi, saya berharap sosialisasi itu tidak hanya pembayaran secara online saja karena tidak semua orang bisa mengakses internet atau paham menggunakannya. Yang jelas, sosialisasi itu dapat dipahami dengan menyediakan akses pembayaran pajak yang mudah seperti mobil

samsat keliling, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok, tegas Bambang.

Plt Kepala Bapenda Sri Sulistyani mengatakan, dalam penerimaan pajak daerah, ada juga pajak air permukaan (PAP) dan pajak rokok. Wajib pajak untuk PAP yakni orang pribadi dan badan akan dikenakan pajak sebesar 10% dari volume air yang diambil selama sebulan. Namun untuk PAP akan kembali ke masyarakat karena ada aturan bagi hasil, yaitu 70 persen dari pajak yang diperoleh dikembalikan ke Pemkab/pemkot dan 30% ke pemprov. (Bdi)

## Unika Launching Program MBKM Secara Virtual

**SEMARANG (KR)** - Menanggapi kebijakan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Unika Soegijapranata Semarang mengakomodasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dibuka secara resmi secara online melalui ruang virtual Unika Soegijapranata, Jumat (12/3).

Hadir dalam launching Program MBKM Unika Soegijapranata tersebut Rektor Unika Soegijapranata Prof Dr F Ridwan Sanjaya MS IEC, Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I) Dra Cecilia Titiek Murniati MA PhD, WR II Dr Theresia Dwi Hastuti

MSi Akt, WR III Dr V Kristina Ananingsih ST MSc, WR IV B Danang Setianto SH LLM MIL, para Ketua Program Studi dan para mahasiswa peserta MBKM.

Rektor Unika Prof Ridwan menegaskan kembali komitmen Unika dalam penyelenggaraan pembelajaran perkuliahan MBKM bersama NUNI (Nationwide University Network in Indonesia) dan APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik). Unika tahun 2017 pernah menyampaikan siap menghadapi disruptive innovation sehingga berbagai hal yang dikembangkan sejak tahun 2017 memang tujuannya un-

tuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, baik secara langsung maupun secara digital.

Sedang Wakil Rektor I Bidang Akademik Unika Soegijapranata Dra Cecilia Titiek Murniati MA PhD menjelaskan tentang proses pelaksanaan Program MBKM di Unika. Unika berusaha mawadahi dan melaksanakan Program MBKM yang dimulai oleh pemerintah sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. "Tentu saja hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi lulusan baik hardskill maupun softskill agar lebih



KR-Sugeng Irianto

**Rektor Unika saat membuka MBKM secara virtual**

siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, kemudian menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa dan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat yang dimiliki," jelas Dra Cecilia

Titiek Murniati PhD. Menurut WR I Unika ini, sejak Agustus 2020 Unika sudah mempersiapkan dengan NUNI dan APTIK, melaksanakan MBKM dalam bentuk pertukaran pelajar bersama jaringan NUNI dan APTIK. (Sgi)

## MUSDA PM KABUPATEN SEMARANG Andika Wisnu Ketua, Gantikan Danar

**SEMARANG (KR)** - Andika Wisnu terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Semarang pada Musda yang berlangsung di aula gedung SMK Muhammadiyah Suruh, Kamis (11/3). Musda periode Muktamar XVII bertema 'Meningkatkan Peran Kader dalam Gerakan Dakwah Ta'awun Menuju Kabupaten Semarang Berkemajuan' dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Semarang Prof Dr HM Saerozi MAG.

Terpilih sebagai Sekretaris Umum Firmansyah, Sekretaris Harian Wirid Pralayajati, Bendahara Umum Agus Susanto, Wakil Masrukhin S.

Sekretaris Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Suruh Hendro Setyawan menginformasikan, Musda berlangsung dalam kondisi protokol kesehatan yang ketat.

Prof Dr HM Saerozi MAG yang sehari-hari menjabat sebagai Wakil Rektor UIN Salatiga dalam sambutannya menyatakan pentingnya menjaga kesetiaan dan ke taatan terhadap NKRI. Menurutnya, persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 berkontribusi besar dalam pendirian negara RI yang merdeka pada tahun 1945. Ia berpesan agar kader Pemuda Muhammadiyah selalu berada di jalur amar makruf nahi munkar, selalu berpikir jernih dan logis. (No)



KR-Istimewa

**Andika Wisnu (tengah) menyampaikan sambutan setelah terpilih sebagai ketua.**

## Mimbar Legislatif

### Keluar Masuk Ternak Perlu Pengawasan Ketat

**AKSES** jalan tol, selain mempermudah percepatan arus transportasi, ternyata juga membawa dampak buruk terhadap pengawasan lalu lintas ternak yang ke luar dan masuk wilayah Jateng. Dengan adanya jalan tol, sekarang jarang truk pengangkut ternak yang mendatangi Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) untuk proses screening atau penyaringan secara ketat agar kualitas ternak tetap terjaga dan terhindar dari penyakit menular.

Saat melakukan pemantauan kondisi di PLLT Banaran Kabupaten Sragen pekan lalu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni mengakui peran PLLT sangat penting untuk menghambat penyebaran penyakit hewan ternak yang menular. Selain itu juga sebagai sarana untuk melakukan penghitungan komoditas ternak. PLLT menjadi sarana untuk meneliti apakah hewan yang masuk ke Jateng tersebut membawa penyakit menular atau ti-



KR-Budiono

**Sri Maryuni**

dak. Jika sampai ada ternak yang membawa penyakit menular dan lolos dari pengawasan, dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka akan menjadi permasalahan serius.

Apalagi konsumsi hewan ternak di Jateng cukup tinggi, sehingga mereka harus dilindungi dari mengkonsumsi hewan yang berpenyakit. PLLT sangat membantu pemerintah untuk memantau daerah mana saja sebagai konsumen dan penyuplai ternak di Jateng. Saat Komisi B berdiskusi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Jateng Lalu

Muhammad Syafridi, dikatakan bahwa PLLT mempunyai tugas utama sebagai barrier atau pembatas penyakit hewan ternak menular yang akan masuk di Jateng.

Dengan demikian PLLT menjadi tolok ukur komoditas penyuplai ternak, baik dari luar maupun dalam provinsi. Saat justru keberadaan jalan tol menjadi kendala yang dihadapi PLLT Sragen. Truk pengangkut ternak tidak lagi melewati PLLT tetapi langsung masuk Jateng melalui jalan tol. Mengingat pentingnya keberadaan PLLT, Komisi B DPRD Jateng minta kepada pemerintah agar menambah fasilitas PLLT di rest area atau di pintu masuk tol di perbatasan Jateng. Dengan cara tersebut pengawasan terhadap hewan ternak yang masuk provinsi ini tetap bisa diawasi. (\*)

(Disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)